

44
Dag. 10/05
Ham
a

SKRIPSI

AKUISISI OLEH PELAKU USAHA YANG MENGARAH PADA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TIMUR IBNU HAMDANI
039914939

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

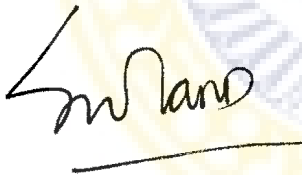
**AKUISISI OLEH PELAKU USAHA YANG MENGARAH PADA
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 132 133 957



Timur Ibnu Hamdani
NIM. 039914939

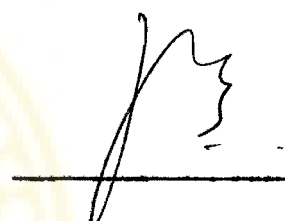
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 18 Juni 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : J. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



2. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM.



3. Jani Purnawaty, S.H., S.S., LL.M.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Negara selaku regulator harus konsisten dalam menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini terutama apabila dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh negara yang memegang monopoli atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sekali cabang-cabang produksi tersebut dikuasai oleh negara, maka negara harus mengoptimalkan hak penguasaan yang telah diberikan Undang-Undang tersebut, dan memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat. Apabila negara tidak mampu memikul kewenangan sebagai pemegang monopoli maka harus berbenah diri supaya negara tidak rugi dan terutama rakyat tidak dirugikan. Dan apabila ternyata negara masih tidak mampu, maka saatnya pengelolaan tersebut melibatkan peran serta dari pihak swasta. Dengan melibatkan swasta diharapkan persaingan akan menjadi semakin sehat, dan konsumen (rakyat) mendapatkan yang terbaik. Penegakan hukum Persaingan dalam rangka menciptakan kondisi pasar yang sehat dan persaingan yang sempurna, tidak hanya menjadi tanggung jawab KPPU selaku lembaga yang berwenang. Melainkan juga memerlukan peran serta dari masyarakat, terutama kalangan pelaku usaha, dan lembaga peradilan selaku pemegang kekuasaan yudisiil. Hal ini didasarkan atas fenomena yang berkembang dalam penegakkan hukum Persaingan Usaha, bahwa penegakan tersebut seringkali menghadapi kendala dari kalangan pelaku usaha dan pengadilan sebagai muara keputusan KPPU,

yang seringkali mementahkan/ menganulir keputusan KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum Persaingan Usaha akan sia-sia apabila tidak didukung oleh semua elemen dalam masyarakat. Sehingga dukungan tersebut mutlak harus diberikan, sehingga dapat tercipta kondisi pasar yang sehat dan persaingan yang sempurna.

b. Akuisisi merupakan cara yang paling efektif dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha. Selain efisien, pelaku usaha juga bisa mengurangi resiko kerugian dengan melakukan akuisisi, dan hal ini adalah cara klasik yang seringkali digunakan oleh pelaku usaha dengan berbagai skala. Oleh karena itu cara akuisi pulalah yang harus mendapat perhatian lebih, dalam rangka penegakan hukum Persaingan Usaha .

2. Saran

a. Negara dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, yang memegang cabang – cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, hendaknya mewujudkan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Sehingga citra buruk dari pengelolaan oleh negara yang tidak sehat, yang menggambarkan *missefficiency*, *missmanagement*, lamban dan tidak agresif, tidaka produktif dan kurang *customer oriented*, tidak profesional, kurang memahami pasar dan korupsi, harus diubah. Jika ternyata negara tidak mampu melakukan perubahan, negara harus sadar dan saatnya meyerahkan tanggung jawab pengelolaan tersebut kepada swasta. Dengan penyerahan kepada swasta maka akan tercipta kompetisi dan hanya yang terbaiklah yang akan menang.

- b. Dengan globalisasi dunia usaha dan era perdagangan bebas, KPPU harus melakukan langkah antisipatif. Hal ini bisa diwujudkan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawas persaingan usaha negara lain, sehingga terjalin kerjasama antar lembaga-lembaga pengawas persaingan usaha seluruh dunia, yang pada akhirnya akan meringankan kerja KPPU sebagai satu-satunya lembaga independen pengawas persaingan usaha di Indonesia.
- c. Akuisisi bisnis merupakan strategi yang umum dan sering digunakan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dalam hal ini KPPU harus mewaspadaai transaksi akuisisi yang melibatkan perusahaan besar dan berskala nasional, hal ini tentunya untuk mencegah dampak yang lebih lanjut. Kemudian yang harus diwaspadai pula adalah transaksi akuisisi lintas negara (*cross border acquisition*) yang seringkali dilakukan oleh pelaku usaha multinasional yang memanfaatkan celah dalam Undang-Undang kita. Selain itu KPPU perlu melakukan sosialisasi atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ke seluruh elemen masyarakat, terutama ke pelaku usaha, lembaga peradilan dan lembaga pengawas pasar. Sehingga dengan sosialisasi tersebut diharapkan timbul peran aktif semua elemen dalam rangka penegakkan Undang-Undang Persaingan.